

PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN MOBILITAS SOSIAL NELAYAN

THE FISHERY FINANCE AND THE SOCIAL MOBILITY OF FISHERMAN

Masyhuri

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI)
masyhuri_lipi@yahoo.com

Abstract

This article aims to address the importance of non-formal financial institution role toward the social mobility of fisherman as well as the development of Indonesian small scale fishing sector. This institution can be an individual entrepreneur or financial agent, which provides credit or other stimulus. From qualitative approach, the social mobility of fisherman and the development of fishing is a consequence of economic relations complexity. However, the role of non-formal financial institution is a dominant factor. This institution is important and always needed as far as the formal financial institutions have not been able to provide opportunity for all fishermen to access the capital. The compatibility of formal finance system and socio-economic characteristics of fishermen is an important factor to encourage the increase of formal finance system role in fishery.

Keywords: *fishery, fisherman's income, investment, social mobility*

Abstrak

Artikel ini mengetengahkan pentingnya peran lembaga pembiayaan nonformal dalam proses terjadinya mobilitas sosial nelayan dan perkembangan usaha perikanan tangkap Indonesia skala kecil. Lembaga pembiayaan nonformal yang dimaksud bisa berupa pengusaha perorangan atau agen dari perusahaan finansial yang menyalurkan kredit, atau yang memberikan berbagai stimulus lainnya. Dari perspektif kualitatif, mobilitas sosial nelayan dan perkembangan usaha perikanan merupakan akibat dari kompleksitas hubungan ekonomi. Namun, bagaimanapun juga peran lembaga pembiayaan non-formal tampaknya

merupakan faktor yang dominan. Lembaga tersebut tetap penting dan selalu diperlukan sejauh lembaga pembiayaan formal belum mampu memberikan peluang pada nelayan untuk memperoleh modal usaha yang mereka butuhkan. Kesesuaian antara sistem pembiayaan formal dan karakteristik sosial ekonomi nelayan tampaknya merupakan faktor penting bila ingin mendorong peran lembaga pembiayaan formal meningkat pada usaha perikanan tangkap.

Kata kunci: perikanan, pendapatan nelayan, investasi, mobilitas sosial

Pendahuluan

Pembiayaan nelayan sampai dewasa ini masih tetap merupakan masalah dalam pengembangan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap skala kecil. Nelayan di Indonesia umumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan. Padahal, usaha perikanan tangkap merupakan usaha padat modal. Untuk pengadaan satu unit lengkap perahu *kotekan* (Pasongsongan), perahu *gardan* (Lamongan), perahu *apung* (Bagansiapiapi), perahu *slerek* (Trenggalek), perahu *jaring apung* (Indramayu) yang berukuran antara 15 Gross Tonage (GT) sampai 20 GT misalnya, dibutuhkan dana mulai dari Rp.500 juta hingga Rp.1 milyar. Perahu-perahu nelayan yang berukuran lebih kecil sekitar 10 GT harganya juga cukup tinggi, tidak kurang dari Rp.250 juta per unitnya (Masyhuri, 2013; Masyhuri, Tanpa Tahun). Kenyataan bahwa usaha perikanan tangkap merupakan usaha padat modal memang merupakan hal yang sulit dibantah.

Permasalahan yang muncul, dari mana para nelayan mendapatkan modal usaha, sementara lembaga-lembaga keuangan formal seperti bank enggan menyalurkan kredit kepada mereka? Lembaga perbankan umumnya menilai bahwa pengucuran kredit pada usaha perikanan tangkap mempunyai risiko yang tinggi. Sementara itu, paket-paket pembiayaan program pemerintah pada sektor perikanan tangkap, jumlahnya terbatas dan sifatnya parsial, sehingga kurang optimal.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan belakangan ini, diketahui bahwa pembiayaan nonformal merupakan institusi penting yang mempunyai peran besar di bidang investasi pada usaha perikanan

tangkap.¹ Karena itu, permasalahannya kemudian tidak hanya berhenti pada peran pentingnya pembiayaan non-formal pada usaha perikanan tangkap, tetapi hendaknya menyentuh faktor-faktor yang memungkinkan lembaga pembiayaan non-formal tersebut mampu membangun kerjasama dengan para nelayan. Pemahaman terhadap hal tersebut jelas masih diperlukan dan akan bermanfaat.

Oleh karena itu, masalah pembiayaan nelayan perikanan tangkap dan pengaruhnya terhadap dinamika yang terjadi pada masyarakat nelayan dan perkembangan usaha perikanan dalam makalah ini ditempatkan sebagai tema pokoknya. Lebih lanjut akan ditelusuri pula berbagai aspek yang memungkinkan dirumuskannya sistem pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan dan usaha perikanan tangkap. Masalah-masalah, seperti organisasi penangkapan ikan, pendapatan nelayan, dan dinamika internal, baik yang berkaitan dengan mobilitas sosial maupun perkembangan usaha perikanan tangkap, dengan demikian menjadi simpul-simpul penting dalam penelaahannya. Data primer yang digunakan adalah data primer hasil dari berbagai penelitian, terutama data hasil penelitian nelayan di Karangsong (Indramayu), Prigi (Trenggalek), dan Bagansiapiapi (Riau). Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai penerbitan yang relevan.

Faktor penting yang menyebabkan hampir tertutupnya akses permodalan nelayan pada lembaga perbankan adalah anggapan bahwa nelayan itu miskin, bodoh, dan kurang mampu merencanakan masa depan mereka sendiri (Masyhuri, 2001; Masyhuri, 2006). Mereka dianggap berpendapatan rendah dan tidak menentu, sehingga dianggap tidak akan mampu mengembalikan pinjaman secara teratur. Usaha penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil masih dianggap sebagai usaha yang penuh spekulasi. Usaha tersebut tidak lebih bagaikan seni, seni berburu yang pendapatannya tidak menentu. Kadang-kadang nelayan berpenghasilan besar, dan kadang-kadang gagal tidak mendapatkan hasil sama sekali. Tingkat perekonomian mereka umumnya masih berada pada tataran subsisten, dengan pendapatan yang pas-pasan, dan berada di bawah pendapatan rata-rata kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Sawit,

¹Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah beberapa penelitian tentang pembiayaan perikanan tangkap yang dilakukan di sejumlah daerah oleh P2E-LIPI antara tahun 2011 dan 2013. Naskah lengkap hasil penelitian yang dimaksud pada saat ini masih dalam proses penerbitan. Lihat M. Nadjib, 2013; Thoha, Akan terbit.

1988; Mubyarto, 1994). Karena itu, pengucuran kredit kepada nelayan tangkap dianggap mempunyai risiko yang tinggi.

Pembiayaan Nelayan: Perspektif Sejarah

Kerja sama antara nelayan dan lembaga pembiayaan nonformal pada usaha perikanan tangkap tampaknya telah mempola, dan berakar jauh dalam proses sejarahnya. Pola kerja sama tersebut dapat ditemukan di hampir semua komunitas nelayan di Indonesia. Sebaliknya, pola kerja sama antara nelayan dengan lembaga pembiayaan formal hampir-hampir tidak pernah terbentuk, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa Indonesia merdeka. Pembiayaan nonformal pada usaha perikanan tangkap tampaknya telah saling bersinergi. Pembiayaan atau kredit untuk nelayan dari lembaga formal, kalau ada, biasanya disalurkan terutama untuk perikanan tambak.

Pada tahun 1910 misalnya, jumlah kredit yang disalurkan *Volkscredietwezen* (Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekarang) kepada sektor perikanan hanya 97.220 gulden atau 1.9% dari seluruh jumlah kredit yang disalurkan lembaga tersebut, yang pada tahun itu mencapai 8.849.192 gulden. Jumlah kredit nelayan turun menjadi 0.83% dalam kurun waktu sampai tahun 1930, meskipun secara nominal jumlah kredit tersebut mengalami kenaikan, yang pada tahun 1930 telah mencapai 603.300 gulden. Hanya saja, sebagaimana disebutkan, sebagian besar dari jumlah tersebut disalurkan untuk perikanan tambak (Masyhuri, 1996: 192-195). Alasannya, pendapatan nelayan tambak lebih teratur, lebih mudah dikontrol, dan nelayan tambak mampu memberi agunan untuk pinjaman mereka, dengan lahan tambak misalnya. Kredit yang disalurkan pada usaha perikanan tangkap selalu kecil jumlahnya.

Pada masa Indonesia merdeka, yakni pada pelaksanaan program Bimbingan Massal (Bimas) tahun 1980, nelayan pernah mendapatkan pinjaman dari pemerintah melalui program tersebut. Penyaluran kredit yang dilaksanakan tahun itu merupakan yang pertama dan sekaligus juga yang terakhir kalinya. Kredit Bimas nelayan tersebut dianggap gagal, dan sesudah itu perbankan tidak lagi “berani” menyalurkan kredit untuk nelayan perikanan tangkap.

Dibandingkan dengan kredit perbankan yang disalurkan pada sektor pertanian, baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan, usaha perikanan tangkap seakan-akan dianaktirikan. Pada tahun 2011 misalnya, BRI telah menyalurkan kredit sektor perikanan

sebanyak Rp.1.5 triliun. Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk kredit komersial, kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan perikanan, serta program lainnya. Kredit BRI tersebut ternyata disalurkan juga terutama untuk usaha budidaya, khususnya tambak udang (*Akuamina*, 1-15 September 2012). Keengganan bank menyalurkan kredit pada usaha penangkapan ikan ini tampaknya menjadi faktor penting memolanya pembiayaan lembaga keuangan nonbank pada nelayan perikanan tangkap di Indonesia. Pada tataran paling depan, yang akrab dengan kehidupan nelayan adalah pola pembiayaan nonformal yang berasal dari para *rentenir* atau pelepas uang. Meskipun *rentenir* mempunyai konotasi negatif, yang dianalogkan dengan penghisap darah atau lintah darat, perannya pada usaha perikanan tangkap sangat nyata dan mempunyai latar belakang yang cukup panjang dalam sejarah nelayan di Indonesia (Masyhuri, 1996).

Setidak-tidaknya, pola pembiayaan nonformal yang dimaksud telah mengemuka sejak abad ke-19, yakni ketika terjadi aliansi antara penyewa (*pachter*) dan pemerintah. Pada saat itu, polarisasi kekuasaan politik masih tajam dan kemampuan pemerintah kolonial dalam mengumpulkan pajak masih terbatas. Keadaan seperti ini memaksa pemerintah menyewakan hak penarikan pajak yang dimaksud kepada pihak ketiga, melakukan kompromi atau mengadakan aliansi dengan para penyewa, yakni dengan para *pachter* (Masyhuri, 1996). Sistem sewa seperti ini tidak hanya diterapkan di bidang penangkapan ikan, tetapi juga di bidang-bidang usaha lainnya (Butcher & Dick, 1993). Sistem sewa pada perikanan tangkap diterapkan di daerah Banten, Pekalongan, Semarang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan daerah-daerah Jawa lainnya, serta beberapa daerah di luar Jawa, seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Masyhuri, 1996).

Dalam sistem sewa yang diberlakukan, pemerintah memperoleh uang sewa dalam jumlah tertentu, sebaliknya pemerintah memberikan kewenangan kepada *pachter* untuk menarik pajak dan hak-hak istimewa lainnya. *Pachter* sektor penangkapan ikan dengan demikian adalah orang yang mendapatkan lisensi dari pemerintah kolonial untuk melakukan penarikan pajak dari usaha perikanan tangkap berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan pemerintah. Selain itu, para *pachter* mendapatkan pula lisensi untuk berdagang ikan, dan hak istimewa pembelian garam dari pemerintah untuk pengawetan ikan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga garam konsumsi. Perdagangan garam pada waktu itu merupakan perdagangan monopoli pemerintah. Dengan hak

istimewa tersebut, para *pachter* mengembangkan usaha pengolahan ikan asin di pusat-pusat industri pengasinan yang mereka bangun (Masyhuri, 1996).

Transaksi sewa-menyewa atas usaha perikanan tangkap untuk daerah tertentu dilakukan secara terbuka dalam sebuah pelelangan, dilakukan secara serentak dengan sektor-sektor usaha lainnya, sehingga seorang penyewa dapat menguasai hak sewa atas sejumlah usaha yang berbeda. Melalui proses pelelangan seperti ini, integrasi berbagai sektor usaha terjadi, integrasi dari berbagai jenis usaha yang berbeda ke dalam jaringan yang saling menunjang, baik dalam hal investasi, eksploitasi, ataupun pemasaran produk-produk yang dihasilkannya. Termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Dalam konteks usaha perikanan tangkap di Kepulauan abad ke-19, para *pachter* merupakan penggerak, yang berperan sebagai institusi pembiayaan nonformal, sehingga dengan itu usaha penangkapan ikan saat itu dapat tumbuh dan berkembang.

Pada masa itu, peran *pachter* sungguh telah mendorong usaha penangkapan ikan, khususnya yang ada di Jawa, berkembang lebih maju dan terintegrasi ke dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Setidaknya sejak awal pertengahan kedua abad ke-19, para *pachter* benar-benar telah berhasil membangun jaringan bisnis di sektor perikanan dan berhasil mengembangkan komersialisasi sistem sewa. Peran mereka tidak saja sebagai penyedia modal usaha untuk para nelayan, juga sebagai penampung, pengusaha pengolahan ikan, dan sekaligus sebagai distributor perdagangan produk-produk perikanan (Masyhuri, 1996).

Para *pachter* senantiasa menanamkan modalnya pada usaha perikanan tangkap dalam bentuk peralatan penangkapan ikan, terutama dalam pengadaan perahu *mayang*, yang dijual kepada kelompok-kelompok nelayan di wilayah yang disewanya. Para nelayan menerima perahu atau peralatan tangkap tersebut, dan membayarnya dengan cara angsuran, dengan cara menyerahkan sebagian ikan hasil tangkapan mereka. Mereka juga harus menyerahkan sebagian hasil tangkapannya untuk pembayaran pajak, dan menjual sisanya kepada *pachter* pemberi modal. Melalui mekanisme seperti ini, jumlah perahu nelayan terus bertambah, dan kepemilikan perahu secara berkelompok terus meningkat sejalan dengan pelunasan-pelunasan hutang para nelayan. Mobilitas sosial vertikal di kalangan nelayan pada waktu itu sangat dinamis. Jumlah nelayan Jawa terus mengalami peningkatan, yang pada tahun 1870

mencapai sekitar 250.000 orang dengan armada perahu *mayang*² sekitar 15.000 buah (Masyhuri, 1996).

Ketika birokrasi pemerintahan kolonial telah berkembang dan pemerintah mampu menarik pajak secara langsung, sistem sewa secara berangsur dihapuskan, diganti dengan sistem pajak kepala, pajak pendapatan, dan sebagainya. Sistem sewa pada usaha perikanan tangkap sendiri telah dihapus pada tahun 1864, dan sejak itu investasi untuk perikanan tangkap dari para *pachter* bisa dikatakan telah berhenti. Padahal, institusi lain sebagai pengganti tidak atau belum tersedia. Akibat dari dihapuskannya sistem sewa tersebut, usaha perikanan tangkap mengalami perubahan besar, terjadi kemunduran secara perlahan-lahan sejalan dengan berkurangnya perahu *mayang* akibat tenggelam ataupun termakan usia. Produktivitas penangkapan ikan menurun, yang lebih lanjut berimbas pada industri pengolahan dan perdagangan ikan. Pergeseran terjadi, dari usaha penangkapan ikan lepas pantai ke usaha penangkapan ikan dekat pantai, dan sejak awal abad ke-20, usaha penangkapan ikan di pantai utara Jawa telah didominasi oleh usaha penangkapan ikan dekat pantai (Masyhuri, 1996).

Apabila pada tahun 1870 jumlah perahu *mayang* di pantai utara Jawa mencapai 15.000 buah, jumlah tersebut pada tahun 1902 telah merosot menjadi sekitar 4.250 buah (Masyhuri, 2009). Usaha perikanan tangkap di pantai utara Jawa dengan demikian mengalami apa yang disebut dengan de-industrialisasi (Bagchi, 1976), yang ditandai antara lain semakin berkurangnya jumlah nelayan, berkurang atau menurunnya pendapatan perkapita sektor perikanan, dan "mandek" atau mundurnya teknologi perikanan tangkap. Sejalan dengan runtuhnya *pachter* sebagai institusi pembiayaan usaha perikanan tangkap, serta belum adanya institusi pengganti, maka *rentenir* (pelepas uang/lintah darat) memperoleh momentumnya, muncul sebagai institusi penyedia modal yang mendominasi usaha perikanan tangkap. Tampaknya, kelembagaan *rentenir* semakin dominan dan terus menguat sampai dengan saat

²Perahu *mayang* adalah jenis perahu nelayan yang berukuran paling besar di Kepulauan abad ke-19. Perahu ini dioperasikan oleh sekitar 30 nelayan dan menangkap ikan dengan jaring *payang*. Sistem penangkapan ikan dengan perahu *slerek* dan jaring mini *purse seine* di Prigi (Jawa Timur) saat ini mirip dengan sistem penangkapan ikan dengan perahu *mayang* pantai utara Jawa abad ke-19.

sekarang ini. Mereka menanamkan modal dalam bentuk uang pinjaman secara perorangan kepada *juragan* atau para nelayan.

Berbeda dengan *pachter*, para *rentenir* tidak bertanggung jawab atas risiko usaha yang menimpa nelayan, seperti kerusakan atau kehilangan perahu. Dalam hubungan kerja seperti ini, nelayan bersikap sangat hati-hati meminjam modal untuk usaha. Akibatnya, investasi dari para *rentenir* lebih terbatas dibandingkan dengan investasi yang dilakukan oleh para *pachter* pada masa-masa sebelumnya. Pendapatan nelayan menurun (Masyhuri, 1998). Anggapan bahwa nelayan berpendapatan rendah, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, terus melekat pada mereka, dan setelah melalui proses waktu, menjadi stereotip nelayan Indonesia (Semedi, 2003; Butcher, 2004).

Penggalakan modernisasi usaha penangkapan ikan oleh pemerintah melalui kerja sama atau *joint venture* dengan pengusaha asing justru mendorong munculnya dualisme ekonomi pada usaha perikanan tangkap (Bailey, 1988). Modernisasi yang dimaksud lebih banyak menyentuh usaha penangkapan ikan skala besar daripada usaha penangkapan ikan rakyat skala kecil. Dengan diluncurkannya program modernisasi sektor perikanan, jumlah kapal perusahaan penangkapan ikan sampai tahun 1996 telah bertambah menjadi 4.396 unit, yakni meningkat sebesar 134% jika dibandingkan dengan jumlah kapal pada tahun 1992 (Ditjen Perikanan Tangkap, 1997). Kapal-kapal tersebut umumnya merupakan milik perusahaan *joint venture* yang memang secara gencar dalam periode-periode itu dipromosikan oleh pemerintah.

Program yang belakangan ini diluncurkan oleh pemerintah untuk usaha perikanan tangkap adalah program bantuan 1000 unit kapal nelayan berukuran 30 GT. Program tersebut digulirkan mulai tahun 2011, sebagai program modernisasi terhadap perikanan tangkap skala kecil. Diharapkan, program ini telah dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2014. Belajar dari realitas sejarah yang terjadi, paket pembiayaan dalam bentuk program bantuan 1000 unit kapal nelayan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Jika tidak, dapat saja program tersebut akan menambah corak ekonomi dualistik pada usaha perikanan tangkap di Indonesia. Atau, program tersebut akan mengalami kegagalan, sebagaimana yang telah terlihat di Prigi, Karangsong, Bagansiapiapi, dan di tempat-tempat lainnya. Pengabaian terhadap keanekaragaman usaha dan tradisi

masyarakat nelayan setempat tampaknya menjadi faktor penting mubadzir atau gagalnya bantuan kapal 30 GT di daerah-daerah tersebut.

Pendapatan Nelayan dan Perkembangan Usaha Perikanan Tangkap

Keberadaan lembaga pembiayaan nonformal dan peran pentingnya lembaga tersebut pada usaha perikanan tangkap di Indonesia memang merupakan fenomena yang mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Bertolak dari aspek historis tersebut, pertanyaannya kemudian adalah apakah pendapatan dan kemampuan ekonomi nelayan tidak mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian mereka tidak mampu memenuhi sendiri modal usaha yang diperlukan?

Pola hubungan yang terbentuk antara nelayan dan pemodal nonformal tampaknya memang cukup berpengaruh. Pada saat-saat pola hubungan antara mereka bersifat simbiosis, pendapatan nelayan cukup memadai. Akumulasi modal pada mereka terjadi, meskipun prosesnya lambat, dan investasi dari nelayan untuk pengembangan usahanya menjadi lebih mungkin. Peran lembaga pembiayaan nonformal dengan demikian akan dapat tergeser. Sebaliknya, pada masa-masa hubungan mereka bersifat eksploitatif, pendapatan nelayan umumnya rendah. Tingkat perekonomian nelayan buruk, dan dalam keadaan seperti ini, investasi dari nelayan sendiri hampir-hampir tidak mungkin. Semakin besar pendapatan dan kemampuan ekonomi nelayan, maka semakin lemah keterikatan mereka dengan pemodal nonformal, dan bila demikian, mobilitas sosial di kalangan nelayan akan menjadi sangat dinamis.

Hubungan simbiosis antara nelayan dan pemodal nonformal memang pernah terjadi. Setidak-tidaknya, sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut berlangsung dalam beberapa dasawarsa paruh kedua abad ke-19. Pada masa-masa itu, pendapatan nelayan cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Jawa, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya, seperti petani ataupun pekerja harian di perkebunan-perkebunan. Pada masa-masa itu, pendapatan nelayan per kapita per hari mencapai 24,9 sen. Padahal, pendapatan per kapita per hari petani hanya sebesar 19,3 sen. Pendapatan per kapita per hari penduduk Jawa sendiri malahan hanya 18,3 sen (Masyhuri, 1998). Kehidupan ekonomi nelayan cukup baik, lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan petani, atau penduduk Jawa pada umumnya. Oleh karena itu, Boomgaard (1989) mengatakan bahwa sektor perikanan saat

itu merupakan salah satu dari dua sektor primer terpenting di luar pertanian.

Pola hubungan yang bersifat simbiosis tersebut melemah paling tidak sejak akhir abad ke-19. Pada waktu itu, pola hubungan eksploitatif antara nelayan dan pemodal mengemuka, menguat, dan berlangsung terus sampai saat-saat sekarang. Dalam hubungan yang eksploitatif seperti ini, kedudukan nelayan kurang menguntungkan. Mereka lebih banyak berstatus sebagai objek bagi pemodal nonformal daripada sebagai mitra kerja.

Akibatnya, pendapatan nelayan yang semula cukup menjanjikan itu mengalami penurunan tajam, jatuh berada jauh di bawah pendapatan per kapita kelompok tani ataupun kelompok-kelompok lainnya. Pada dasawarsa ke-2 abad ke-20 misalnya, pendapatan nelayan per kapita per hari merosot menjadi sekitar 15.4 sen. Pendapatan per kapita petani sendiri mengalami peningkatan menjadi 22.5 sen per hari. Pendapatan buruh harian pabrik gula meningkat pula menjadi 40 sen per hari. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10 sen bila dibandingkan dengan pendapatan mereka pada beberapa dasawarsa terakhir abad ke-19 (Masyhuri, 1998). Hubungan eksploitatif yang terbangun antara nelayan dan pemodal nonformal yang tumbuh dengan suburnya saat itu tampaknya menjadi faktor penting kemerosotan pendapatan nelayan.

Dalam konteks realitas dewasa ini, hubungan antara nelayan perikanan tangkap dan pemodal nonformal terjadi tidak hanya bersifat eksploitatif, tetapi kadang-kadang juga bersifat simbiosis. Yang menarik, pola hubungan yang eksploitatif tersebut tidak hanya bersifat satu arah, yakni pemodal mengeksploitasi nelayan penerima modal, tetapi juga bisa sebaliknya. Paling tidak, hasil penelitian nelayan di Prigi (Trenggalek), Bagansiapiapi (Rokan Hilir), Karangsong (Indramayu), memberi gambaran sebagaimana yang dimaksud.

Perekonomian nelayan di Prigi dan di Karangsong bisa dikatakan cukup mapan. Kemiskinan nelayan kurang mengemuka, dan jurang antara kelompok nelayan kaya dan nelayan miskin cukup samar. Pola hubungan kerja yang terbangun antara nelayan dan pemodal nonformal di kedua daerah cukup terlembagakan dalam pola yang agak berbeda. Apabila di Prigi, hubungan yang dimaksud lebih bersifat eksploitatif, sebaliknya di Karangsong, hubungan tersebut lebih bersifat simbiosis. Hubungan kerja sama yang bersifat eksploitatif di Prigi sangat unik, karena justru nelayan

mempunyai posisi yang cukup kuat dan dalam batas-batas tertentu dapat mengeksploitasi pemodal nonformal atau pemilik modal.

Sebagai indikator pendapatan yang memadai nelayan Prigi adalah suatu kenyataan bahwa mayoritas penabung di BRI Unit Prigi, menurut kepala Unit BRI setempat, adalah nelayan. Hadiah-hadiah dari BRI setempat yang diundi secara berkala untuk para nasabah hampir-hampir selalu dimenangkan oleh nasabah nelayan (Wawancara dengan Yuniarto, kepala Unit BRI Prigi pada 26 april 2012). Indikator lainnya, di lingkungan pemukiman nelayan Prigi, bisnis café tumbuh subur, yakni tempat minum-minum dan karaokean. Di tahun 2012 misalnya, jumlah café di lingkungan pemukiman nelayan Prigi mencapai 25 buah. Kafe-kafe tersebut senantiasa dipadati oleh pengunjung, khususnya pada masa-masa panen ikan.³ Bisa dimengerti apabila Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa nelayan Prigi sulit dikelompokkan ke dalam nelayan miskin. Posisi tawar-menawar nelayan yang kuat terhadap pemilik sarana produksi memungkinkan mereka berpendapatan tinggi. Berbeda dengan nelayan-nelayan di tempat lain, mereka terlibat dalam mekanisme pasar (penjualan ikan), dan dengan demikian nelayan dapat menikmati harga ikan secara wajar. Pada saat harga ikan naik, pendapatan mereka mengalami kenaikan pula, dan demikian sebaliknya.

Pendapatan nelayan perahu *slerek* dapat dikemukakan sebagai ilustrasi.⁴ Dalam satu periode penangkapan selama 20 hari dalam setiap bulannya, yakni selama masa gelap tidak ada bulan, sebuah perahu *slerek* secara akumulatif mampu menangkap ikan lebih dari 300 keranjang ikan, jumlah minimal yang digunakan nelayan setempat sebagai ukuran gagal dan tidaknya penangkapan yang mereka lakukan dalam periode 20 hari tersebut.⁵ Hasil penjualan ikan sebanyak itu pada pertengahan tahun 2012 mencapai sekitar Rp.120 juta dengan harga Rp.400.000/ keranjangnya. Penangkapan ikan di tempat ini adalah penangkapan harian, sore

³Dalam percakapan sehari-hari, mereka yang berkunjung ke café diistilahkan “pergi ke Amerika”. Hasil observasi telah membuktikan keberadaan café-café yang dimaksud.

⁴Perahu *slerek* adalah jenis perahu yang paling besar yang ada di Prigi. Digunakan menangkap ikan palagis, terutama ikan tonggol kecil (*rengis*) dengan jaring mini *purse seine*. Perahu ini dioperasikan oleh 22 sampai 35 orang nelayan.

⁵Satu keranjang berisi sekitar 50 kg ikan segar.

berangkat dan pagi hari berikutnya mendarat. Biaya operasional selama 20 kali melaut kurang lebih Rp.20 juta. Setelah dikurangi biaya operasional, hasil bersih dari penjualan ikan dibagi 3 bagian, 2 bagian (sekitar Rp.66. 650.000) untuk pemilik sarana penangkapan ikan, dan 1 bagian (Rp.33.350.000) untuk 22 anak buah kapal (ABK). Pendapatan yang diterima seorang ABK dalam satu periode 20 hari kerja dengan demikian sebesar Rp.1.520.000 jumlah yang cukup memadai mengingat pendapatan ini bagi nelayan setempat dikatakan sebagai pendapatan tambahan.⁶

Pendapatan harian nelayan jauh lebih besar dari itu, yang pada pertengahan tahun 2012 setiap harinya bisa mencapai antara Rp.250.000 sampai Rp.300.000. Jumlah tersebut merupakan bonus dari pemilik perahu setiap kali penjualan ikan hasil tangkapan dilakukan dan penjualan ikan dari *esek* atau *esekan*, *prentilan*, dan *lawuhan* yang mereka terima.⁷ *Esekan*, *prentilan*, dan *lawuhan* merupakan istilah setempat, dalam wujud kantong-kantong plastik yang berisi ikan sebagai bawaan ABK ketika mendarat. Satu *esek* ikan beratnya sekitar 30 kg, satu *prentilan* beratnya sekitar 15 kg, *lawuhan* tidak diketahui beratnya, secukupnya untuk lauk hari itu. Setiap ABK mendapatkan 1 *esek* setiap kali mendarat, atau 2 *esek* bila sedang *solok* (hasil tangkapan banyak), 1 atau 2 *prentilan*, dan *lawuhan*. Kantong-kantong plastik berisi ikan ini biasanya mereka jual kecuali *lawuhan*.⁸ Berapapun hasil tangkapan yang mereka peroleh, *esek*, *prentilan* dan *lawuhan* dipenuhi lebih dahulu. Sisanya baru dihitung sebagai hasil tangkapan hari itu, dijual, dan uangnya dikumpulkan dan dibagi setelah masa gelap berakhir sesuai dengan sistem bagi hasil yang berlaku.

Apabila hasil tangkapan terbatas, maka ikan akan habis dibagi untuk *esek*, *prentilan*, dan *lawuhan*. Tidak ada penjualan ikan dan tidak

⁶Menurut pengakuan sejumlah ABK, uang sebesar Rp.2 juta sebagai perolehan selama 20 hari kerja masih dianggapnya sebagai suatu kegagalan (*Nek mung semanten, etungane isih apes*). Hasil wawancara bebas ketika dilakukan observasi lapangan.

⁷Hasil penjualan ikan setiap kali mendarat dikeluarkan 10%, 5% untuk pemilik perahu, dan 5% dibagi untuk semua ABK secara merata. Sisanya (90%), dikumpulkan oleh pemilik perahu dan dibagi pada akhir *masa petengan* (20 penangkapan ikan).

⁸Satu *esek* berisi rata-rata 30 kg ikan segar. Satu *prentilan* berisi sekitar 15 kg. *Lawuhan* jumlahnya tidak seberapa, dan kadang-kadang dijual juga, atau diberikan kepada kenalan yang membutuhkannya.

ada pendapatan yang diserahkan kepada pemilik perahu. Pemilik perahu dalam kesempatan ini tidak mendapat bagian sedikitpun. Yang seperti ini bisa berkelanjutan selama hasil tangkapan ikan hanya cukup untuk *esekan*, *prentilan*, dan *lawuhan*. Hubungan kerja yang eksploitatif memang telah menggejala, eksploitasi dilakukan tidak oleh pemilik modal, tetapi sebaliknya, oleh nelayan terhadap pemilik modal. Kekuasaan penetapan besaran ikan yang dibagikan untuk nelayan ABK dan yang diserahkan kepada pemilik perahu sepenuhnya berada pada nahkoda. Kuatnya tawar menawar ABK (*belah* dalam istilah setempat) terhadap pemodal atau pemilik sarana penangkapan ikan dengan demikian merupakan faktor penting tingginya pendapatan nelayan Prigi.

Bisa dimengerti jika dikatakan perekonomian nelayan Prigi tidak sebagaimana petani Jawa dalam gambaran Scott (1976), yang dilukiskan hidup bagaikan terendam dalam air sebatas bawah hidung. Nelayan Prigi mempunyai kesempatan untuk survival jauh lebih luas dibandingkan kesempatan serupa yang dimiliki oleh petani Jawa. Kegagalan panen bagi petani Jawa berarti bencana, bagaikan riak air yang dengan segera menutup lubang hidung mereka. Kegagalan penangkapan ikan bagi nelayan Prigi tidak dengan sendirinya berarti bencana bagi mereka.

Selain usaha penangkapan ikan, hampir semua nelayan Prigi juga memiliki sumber perekonomian lain, yakni usaha perkebunan atau pategalan yang mereka usahakan di lahan-lahan milik Perhutani, yang terkenal dengan sebutan perkebunan *goplo* (Susilo, 2010). Mereka berkebun menanam cengkeh, kelapa, pisang, dan tanaman-tanaman produksi lainnya untuk pemenuhan kebutuhan mereka pada masa-masa *paceklik* ikan. Keduanya bersifat komplementer.

Berbeda dengan nelayan Prigi adalah nelayan yang ada di Bagansiapiapi (Riau). Apabila nelayan Prigi mempunyai kekuatan tawar-menawar yang cukup kuat dalam penjualan ikan dan dalam pembagian ikan hasil tangkapan, nelayan di Bagansiapiapi tidak demikian. Realitas empiris yang sulit dibantah yang membedakan komunitas nelayan di Bagansiapiapi dengan nelayan di Prigi antara lain terletak pada kontrol terhadap pendaratan dan penjualan ikan. Di Prigi, Pelabuhan Perikanan Nusantara berperan sebagai sentral pendaratan dan penjualan ikan, di Bagansiapiapi tidak ada tempat yang pasti untuk pendaratan dan penjualan ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ataupun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di daerah ini tidak berkembang sama sekali. Pendaratan ikan di daerah ini dapat dilakukan di mana saja tergantung

kesepakatan antara nelayan dan pemilik kapal atau pedagang ikan (Hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Amrizal, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Rokan Hilir pada 14 Juni 2012). Apakah pola pendaratan ikan yang tidak teratur seperti ini merupakan penyebab terjadinya eksploitasi terhadap nelayan oleh pemodal?

Nelayan-nelayan kaya, yang disebut *bangliau*, umumnya memiliki sejumlah kapal penangkapan ikan, dan gudang atau *tangkahan*, tempat pendaratan, penampungan, dan pengolahan ikan. Jumlah *bangliau* tidak banyak, yang pada tahun 2012 hanya sekitar 38 orang (Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, Tanpa Tahun). Sebagai kelompok, mereka merupakan kelompok kecil dibandingkan dengan seluruh jumlah nelayan yang ada. Namun demikian, mereka menguasai asset dan perputaran usaha penangkapan ikan di Bagansiapiapi. Akibatnya, jurang pemisah antara nelayan miskin dan nelayan kaya menganga cukup lebar, nelayan miskin masih berkutat pada ekonomi subsisten, sementara nelayan kaya telah berada pada tataran ekonomi komersial.

Besarnya pendapatan nelayan kaya sulit diketahui. Dinas Perikanan sendiri tidak bisa memperkirakan berapa besar pendapatan dan jumlah hasil tangkapan mereka. Selain pendaratan ikan perahu-perahu milik *bangliau* dilakukan di gudang mereka masing-masing, juga berbagai jenis ikan dan udang kualitas tinggi langsung diekspor, terutama ke Malaysia.⁹ Jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi hampir-hampir tidak pernah didaratkan untuk konsumsi penduduk setempat, kecuali dalam jumlah yang kecil.

Di luar kelompok kecil nelayan kaya, nelayan-nelayan yang ada di daerah ini mempunyai kedudukan yang sangat lemah. Mereka sangat tergantung dan terikat pada nelayan pemilik modal atau bahkan pada pedagang ikan. Berbeda dengan yang ada di Prigi, nelayan di daerah ini sering menjadi sasaran eksploitasi. Kelompok nelayan miskin, nelayan ABK atau buruh nelayan, sering mengalami kesulitan ekonomi. Pendapatan mereka dari usaha yang mereka lakukan terbatas. Pendapatan bersih sebuah perahu *pompong* misalnya setiap kali melaut mencapai sekitar Rp.300.000 (Wawancara dengan bapak Irwan, pemilik perahu

⁹Praktik-praktik perdagangan ikan seperti inilah menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir sebagai faktor utama tidak dapat berkembangnya TPI atau PPI di Bagansiapiapi.

Pompong (Bagan Hulu) pada 15 Juni 2012.).¹⁰ Sebuah perahu *pompong* rata-rata dioperasikan oleh empat orang ABK, seorang nelayan sebagai *tekong* (nahkoda) dan tiga orang nelayan sebagai ABK. Menurut sistem bagi hasil yang berlaku, hasil bersih dibagi dua, separuh untuk pemilik dan separuh untuk ABK seluruhnya. *Tekong* mendapat 2 bagian, sedangkan ABK masing-masing mendapat 1 bagian (Wawancara dengan bapak Ismail, seorang pemilik perahu *Pompong* di Bagan Hilir, pada 15 Juni 2012). Berdasarkan hitungan ini, seorang nelayan pemilik perahu *pompong* berpendapatan per hari sekitar Rp.150.000. Seorang ABK atau nelayan buruh, kecuali *tekong* per hari berpendapatan Rp.30.000. Sementara itu, *tekong* berpendapatan Rp.60.000. Pendapatan ini sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah yang seharusnya mereka terima, jika hubungan kerja yang terbangun di antara mereka tidak bercorak eksploitatif.

Sebagai gambaran, berikut adalah sebuah kasus hubungan yang eksploitatif seorang pemilik perahu *sampan* dengan seorang pedangan ikan. Kaldun adalah seorang nelayan *sampan*, dan melakukan penangkapan ikan harian (*one day fishing*) dengan *sampan* miliknya. Setiap kali mendarat, ikan tangkapan yang dihasilkannya hampir selalu dibeli oleh *langgan*, seorang pedagang ikan yang selalu menampung hasil tangkapan Kaldun. Pada suatu sore di bulan Juni 2012, Kaldun mendarat dengan perolehan ikan sekitar 1 kwintal. *Langgan* tersebut telah menunggunya di salah satu tempat di pinggir sungai di daerah Bagan Baru, sebagaimana kesepakatan yang dibuat dengan Kaldun melalui telpon genggamnya.

Semua ikan hasil tangkapan Kaldun ditampung, tidak dibayar, dan baru dibayar sekaligus setelah melaut selama 14-15 kali, yakni selama satu periode penangkapan ikan setiap bulannya, atau *satu bintang* menurut istilah setempat (penanggalan China).¹¹ Selama itu, Kaldun hanya diberi uang muka seperlunya untuk keperluan makan sehari-hari atau membeli solar. Penimbangan ikan dilakukan *langgan* tanpa pengawasan atau pembenaran Kaldun. Kaldun hanya menerima jumlah ikan keseluruhan menurut catatan *langgan*. Harga ikan ditentukan juga

¹⁰Perahu *pompong* adalah jenis perahu nelayan setempat yang berukuran sekitar 15 GT.

¹¹Hasil pengamatan terhadap seorang pedagang ikan ketika membeli ikan dari nelayan dan ketika pedagang ikan tersebut menjualnya di salah satu pasar yang ada di kota Bagansiapiapi.

oleh *langgan* berdasar jenis ikan yang tertangkap. Ikan blanak besar per kg nya dibeli Rp.5000, ukuran kecil Rp.3000. Ikan sembilang ukuran besar kecil di beli dengan harga Rp.4000. Demikian jenis ikan lainnya dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh *langgan*. Ikan-ikan tersebut kemudian dibawa dan menurut pengakuannya dijual di pasar *Rubiyah* di kota Bagansiapiapi pada keesokan harinya.¹²

Ketika dilakukan observasi di pasar yang dimaksud, ikan-ikan tersebut ternyata dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pembelian. Ikan belanak ukuran besar dijual Rp.28.000 per kg dan Rp.19.000 untuk ikan belanak berukuran kecil. Ikan sembilang dijual dengan harga Rp.24.000 per kg nya. Demikian jenis ikan lainnya. Padahal, pengeluaran *langgan* dalam usaha ini tidak seberapa, hanya untuk upah buruh dan pembelian es pengawet ikan sampai hari penjualan ikan dilakukan. Dari kasus ini, terlihat bagaimana hubungan kerja yang lebih bersifat eksploitatif berlangsung. Paling tidak, Kaldun, seorang nelayan kecil, mensubsidi besar-besaran kepada seorang *langgan* (pedagang ikan), sehingga *langgan* dapat berdagang dengan keuntungan besar tanpa modal sekalipun.

Hubungan simbiosis antara nelayan dan pemodal nonformal yang diketengahkan dalam tulisan ini adalah hubungan simbiosis yang terjadi di kalangan nelayan Karangsong. Hubungan kerja yang terjadi antara nelayan buruh dan pemilik modal di daerah ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, sehingga pendapatan nelayan cukup baik, mobilitas vertikal dapat terjadi setiap saat, dan investasi pada usaha perikanan tangkap dapat dilakukan oleh nelayan. Lebih lanjut, usaha penangkapan ikan di daerah ini dapat berkembang dengan baik.

Di Karangsong, TPI dapat berperan secara optimal sejalan dengan peran pentingnya koperasi nelayan *Mina Sumitra*. Koperasi *Mina Sumitra* merupakan koperasi nelayan yang bersifat homogen, beranggotakan 83 orang *juragan* atau pemilik kapal. Koperasi ini tampaknya didirikan sebagai sarana kerja sama untuk memperkuat daya tawar nelayan terhadap pedagang ikan. Koperasi adalah pengelola TPI, dan anggota koperasi berkomitmen menjual ikan mereka di TPI dengan

¹²Wawancara dengan seorang *langgan* yang diamati pada tanggal 16 Juni 2012. Wawancara dilakukan melalui obrolan bebas dan menggali informasi yang dicari dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung.

cara lelang.¹³ Terselenggaranya pelelangan ikan secara terbuka tampaknya memacu berkumpulnya nelayan lain di tempat ini untuk melelang ikan. Untuk mendapatkan, pedagang mau tidak mau harus datang ke TPI. Penjualan ikan melalui mekanisme lelang jelas mendongkrak harga ikan. Nelayan, baik ABK maupun pemilik modal mendapatkan harga jual secara wajar, dan berpendapatan secara wajar pula.¹⁴ Apabila harga ikan meningkat, pendapatan mereka ikut meningkat, demikian sebaliknya. Dengan berperannya TPI secara baik, *cash-flow* setiap perahu nelayan yang melelang ikan di tempat ini tercatat dengan baik, dan berdasarkan *cash-flow* tersebut, atau adanya *track record* pendapatan nelayan Bank Jabar-Banten (BJB) bersedia mengucurkan kredit kepada nelayan. Realitas seperti ini merupakan karakteristik usaha perikanan di tempat ini, dan memberikan gambaran yang cukup kontras dengan usaha perikanan tangkap di Bagansiapiapi, ataupun di Prigi.

Dalam hubungan kerja yang terbangun di antara mereka, nelayan Karangsong merupakan mitra kerja *juragan* pemilik kapal, dan dapat melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun. Mereka menangkap ikan dengan kapal *jaring apung (gillnet)*, berbobot sekitar 60 GT, dengan jumlah ABK sebanyak 15 orang, dan menangkap ikan palagis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di perairan lepas pantai seperti cacalang, tengiri, ikan pari, dan ikan lainnya. Mereka menangkap ikan dengan memanfaatkan informasi pemetaan keberadaan ikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Hubungan kerja yang menempatkan nelayan sebagai mitra kerja dan berperannya TPI secara optimal dalam proses penjualan ikan mempunyai konsekuensi langsung pada tingginya pendapatan dan kesejahteraan nelayan ABK.

Seorang nelayan ABK yang bekerja pada sebuah kapal *jaring apung* berpendapatan antara Rp.7 juta sampai Rp.11 juta untuk sekali

¹³Pola umum yang ada di pantai utara Jawa, pemilik kapal justru berperan juga sebagai *langgan*, dan menjalankan praktek-praktek pembelian ikan sebagaimana kasus nelayan Kaldu. Bedanya, pembayaran ikan kepada nelayan di pantai utara Jawa dilakukan setelah ikan terjual.

¹⁴Menurut Carsita pada awal-awal koperasi didirikan, sejumlah *juragan* anggota koperasi ikut berperan sebagai pedagang ikan, dan ikut lelang. Setelah para pedagang ikan berdatangan, mereka secara bertahap melepaskan perannya tersebut. Wawancara dengan Carsita pada tanggal 19 September 2012.

melaut selama 40 hari, atau *sak trip* menurut istilah nelayan setempat. Sedangkan, nelayan yang mempunyai kualifikasi khusus dengan tugas-tugas yang bersifat khusus pula, seperti *juraga laut* atau nahkoda, atau *motoris* (mekanik) berpendapatan lebih besar dari ABK biasa.¹⁵ Apabila dalam *sak trip* seorang ABK berpendapatan sebesar Rp.7 juta, maka pendapatan seorang pemilik kapal mencapai sekitar Rp.105 juta. Sesuai dengan sistem bagi hasil yang berlaku di daerah ini, pemilik kapal mendapat bagian separoh dari pendapatan bersih.

Dengan melihat tingkat perekonomian nelayan yang ada di Prigi, Bagansiapiapi, dan Karangsong, dapat dikatakan bahwa selama kehidupan ekonomi nelayan belum mengalami peningkatan, belum beranjak dari sekedar memenuhi kebutuhan subsistensi, selama itu pula akumulasi modal sulit terjadi, dan investasi untuk pengembangan usaha penangkapan ikan mustahil dilakukan, kecuali dengan dana dari pemodal. Tingkat pendapatan nelayan tampaknya sangat dipengaruhi oleh bentuk pola hubungan kerja sama yang terbangun. Lebih lanjut, usaha penangkapan ikan di suatu tempat tertentu akan mengalami perkembangan yang lebih tinggi apabila hubungan kerja yang terbangun di kalangan nelayan bersifat kemitraan. Hubungan kerja yang bersifat eksploitatif akan senantiasa menjadi faktor penghambat terhadap perkembangan usaha penangkapan ikan yang ada, dan menghambat dinamika dari mobilitas sosial nelayan.

Investasi dan Mobilitas Sosial Nelayan

Sebagaimana yang telah diungkapkan di depan, nelayan sukses atau nelayan bermodal mampu melakukan investasi untuk mengembangkan usahanya pada usaha perikanan tangkap. Sementara itu, hal tersebut sulit dilakukan oleh nelayan yang hidup pada tataran subsisten, atau nelayan yang belum sukses. Nelayan yang mampu melakukan investasi dan sukses, mereka akan mengalami mobilitas sosial ke atas. Tetapi, bila gagal, mereka bisa saja mengalami mobilitas sosial ke bawah. Dalam kehidupan masyarakat nelayan, investasi pada usaha perikanan tangkap dan mobilitas sosial nelayan dengan demikian mempunyai hubungan kausalitas yang kuat.

Pada tataran empirik, fenomena kebangkrutan merupakan fenomena yang lumrah terjadi di kalangan nelayan pemilik kapal. Pada

¹⁵Hasil wawancara dengan sejumlah tokoh nelayan di Karangsong.

suatu saat karena keberhasilannya, seorang nelayan menempati posisi tertinggi dalam stratifikasi masyarakatnya, tetapi pada saat lain mereka dikelompokkan ke dalam strata sosial rendah akibat kegagalan yang dialaminya. Di Karangsong (Indramayu), di Prigi (Trenggalek), juga di tempat-tempat lainnya ditemukan sejumlah nelayan pemilik kapal mengalami kebangkrutan, dan beralih status menjadi ABK atau nelayan buruh, atau beralih pada usaha lain. Dengan berbagai alasan, kapal-kapal penangkap ikan yang sebelumnya dimiliki dijual, untuk membayar utang atau untuk modal usaha baru yang dirintisnya.

Berkenaan dengan ini, di lingkungan komunitas nelayan Prigi muncul ungkapan (pepatah), “Kalau mau kaya buatlah *slerek*, kalau mau miskin buatlah *slerek*”. Ketidakpastian sangat jelas dalam ungkapan ini, dan sekaligus mengisyaratkan bahwa mobilitas sosial di kalangan mereka sangat dinamis. Nelayan pemilik *slerek* setiap saat bisa berjaya, tetapi juga bisa bangkrut. Nelayan di Karangsong memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan dengan nelayan di Prigi. Nelayan yang mengalami mobilitas sosial ke atas tampak cukup dominan dibandingkan dengan mereka yang mengalami mobilitas sosial ke bawah. Hal ini tercermin misalnya pada terus meningkatnya jumlah kapal nelayan yang ada.

Faktor perkembangan teknologi, seperti sistem pengawetan ikan yang lebih baik, pemanfaatan informasi satelit untuk melacak keberadaan ikan, menjadikan nelayan di Karangsong berpendapatan cukup besar dan lebih teratur. Dengan kapal nelayan yang berukuran antara 40 sampai 60 GT, dan dipandu oleh data pemetaan keberadaan ikan lewat satelit, mereka dapat menangkap ikan kapan saja dan di mana saja di perairan Indonesia. Bisa dipahami jika nelayan Karangsong dalam sekali melaut memakan waktu sekitar 40 hari. Selain faktor teknologi, juga faktor keuletan usaha dan keterbukaan. Kerjasama antara pemilik kapal (*juragan*) dan ABK biasanya berjalan dengan baik apabila *juragan* bersikap cukup jujur, dan yang seperti ini mendorong ABK bekerja lebih giat. *Juragan* yang kurang jujur akan senantiasa kesulitan mendapatkan ABK. Berperannya TPI Karangsong secara optimal merupakan kondisi yang kondusif yang mendorong terciptanya hubungan yang terbuka dan adil.

Berbeda dengan ini adalah nelayan Prigi. *Fishing ground* nelayan Prigi tidak terlalu jauh dari pantai. Hanya mengeksploitasi satu spesies ikan tertentu dan dengan jenis alat tangkap tertentu pula, nelayan Prigi mampu mengeksport ikan hasil tangkapan mereka ke luar daerah. Dengan

kata lain, daerah tangkapan nelayan Prigi tidak mengalami *overfishing*. Usaha perikanan tangkap di daerah ini sangat dimamis. Apabila *overfishing* tidak menjadi masalah untuk nelayan di ke dua daerah ini, tetapi tidak demikian untuk nelayan Bagansiapiapi. *Overfishing* bagi nelayan Bagansiapiapi merupakan hal yang serius, dan barangkali karena inilah, daerah ini tidak lagi berpredikat sebagai salah satu pusat penangkapan dan pendaratan ikan utama dunia, seperti dialaminya di masa yang lalu. Di Bagansiapiapi, nelayan setempat mengeksploitasi hampir semua spesies ikan yang ada dengan berbagai jenis alat tangkap yang memungkinkan untuk itu.

Bisa dipahami apabila mobilitas sosial yang dinamis terjadi pada masyarakat nelayan Karangsong dan Prigi, dan agak statis pada masyarakat nelayan di Bagansiapiapi. Pendapatan nelayan yang cukup besar, seperti di kalangan nelayan Karangsong dan Prigi, memungkinkan mereka terus mengembangkan usahanya, dan sebaliknya untuk nelayan Bagansiapiapi. Karangsong dan Prigi pada saat ini bisa dikatakan sebagai pusat-pusat penangkapan ikan terpenting di pantai utara dan pantai selatan Jawa. Sementara Bagansiapiapi sudah tidak mampu lagi mempertahankan statusnya sebagai pusat penangkapan ikan terpenting di kepulauan. Sampai di sini, tampak bahwa pendapatan nelayan, investasi, dan mobilitas sosial nelayan memang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa kasus nelayan yang mengalami mobilitas sosial, baik kasus yang terjadi di Karangsong, Prigi, maupun yang terjadi di Bagansiapiapi.

Akhsan, sebutlah demikian, adalah sebuah contoh dari nelayan Karangsong yang mengalami mobilitas sosial. Pada tahun 2012, Akhsan telah memiliki 31 kapal nelayan, berukuran antara 30 dan 60 GT, dengan ABK berjumlah sekitar 500 orang. Tidak hanya dia seorang, kesuksesan serupa diraih pula oleh sejumlah ABK yang bekerja padanya, yang saat ini telah memiliki kapal *jaring apung* sendiri. Bahkan diantaranya memiliki 7 buah kapal *jaring apung*. Usaha penangkapan ikan dengan *jaring apung*, menurut Akhsan, merupakan usaha yang aman dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap lainnya. Penangkapan ikan dengan *jaring apung*, katanya, “bisa sakit, tetapi tidak bisa mati”. Penangkapan ikan dengan jaring *purse seine*, katanya lebih lanjut “bisa sakit dan bisa mati”.¹⁶

¹⁶*Purse seine* adalah jenis jaring ikan yang dominan di Eetan Wetan (Indramayu), tempat komunitas nelayan yang letaknya tidak jauh dari

Akhsan merupakan seorang *juragan* dalam arti yang sesungguhnya. Meskipun dia lahir dari keluarga nelayan, dia tidak pernah menjadi nelayan ABK. Dia bisa dikatakan langsung menjadi seorang *juragan darat* (nelayan pemilik perahu yang tidak melaut untuk menangkap ikan, kecuali sekali-sekali). Selepas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan, dia magang kerja di Dinas Perikanan Indramayu. Pada tahun 1983, setelah kurang lebih 3 tahun magang, dia keluar dari kantor tempat ia bekerja dengan alasan tidak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri. Dengan uang tabungan yang dikumpulkan selama magang, dia membeli mesin kubota bekas, mesin tempel pendorong perahu. Mesin tersebut dipasang pada perahu pamannya, dengan perhitungan bagi hasil.

Kurang lebih 7 tahun kemudian, dari hasil kerja sama tersebut, dia berhasil membeli perahu *sopekan* yang berukuran sekitar 5 GT. Ternyata, usahanya ini merupakan tahap-tahap awal dari kesuksesan yang dia capai saat ini. Pada tahap awal usahanya, dia kadang-kadang ikut melaut, terutama untuk mengetahui penyebab nelayan gagal mendapatkan ikan. Dari pengamatannya, dia kemudian memodifikasi *jaring apung* yang ada, sehingga dengan jaring tersebut dapat menangkap ikan tengiri, ikan yang nilai jualnya tinggi. Usahanya terus berkembang, dan sampai 2012 dia telah tercatat sebagai nelayan tersukses di daerah ini. Dari hasil kapal yang dimilikinya saat ini, Akhsan diperkirakan setiap bulan mampu membuat sebuah kapal *jaring apung* ukuran 60 GT.

Bagi Akhsan, demikian pengakuannya, pembiayaan baik dari lembaga non-formal maupun lembaga formal sudah tidak lagi penting. Berbeda dengan awal-awal pengembangan usahanya, pinjaman bank sangat penting, dan untuk itu, dia terpaksa menipu mengaku sebagai pengusaha batik. Penipuan ini dilakukan, katanya, karena bank tidak mau memberi kredit kepada nelayan, meskipun ada agunan. Dengan uang pinjaman itu, Akhsan membuat sebuah perahu *sopekan*. Ternyata, kredit yang dia terima, menurut pengakuannya, sudah terbayar lunas sebelum jatuh tempo (Masyhuri, Tanpa tahun).

Seperti halnya Akhsan, Bia, seorang nelayan Prigi, juga merupakan contoh lain nelayan yang mengalami mobilitas sosial ke atas. Pada tahun 2012, dia telah memiliki tujuh buah unit *slerek*. Pada mulanya

Karangsong. *Purse seine* digunakan untuk menangkap ikan palagis (ikan permukaan).

dia hanyalah seorang nelayan ABK biasa. Nasib sedang baik, dia dipercaya oleh seorang saudagar ikan dari Surabaya, dan dipercaya untuk mengoperasikan sebuah perahu *slerek*, sekaligus menjadi pemasok tetapnya. Usaha ini dimulai sejak akhir tahun 1990-an. Setelah berjalan beberapa tahun, Bia mampu membuat perahu nelayan sendiri. Setiap saat jika memperoleh pendapatan cukup, sebagian digunakan untuk membeli kayu, bahan utama pembuatan perahu nelayan. Setelah cukup, pembuatan perahu *slerek* dilakukan. Biaya kekurangannya diperoleh dengan meminjam dari BRI unit setempat.

Usahnya ternyata terus berkembang. Bahkan dia kemudian melakukan akuisisi perahu pedagang ikan yang dipercayakan kepadanya. Dengan perahu yang dimilikinya dan pemasaran ikan yang lancar, Bia mengalami mobilitas sosial vertikal, dari seorang ABK menjadi seorang *juragan laut*, yakni seorang nahkoda yang tidak memiliki perahu, dan yang akhirnya menjadi seorang *juragan darat* atau nelayan pemilik kapal yang tidak lagi melaut. *Juragan darat* merupakan kelompok nelayan yang menempati strata sosial teratas dalam stratifikasi masyarakat nelayan.

Mobilitas sosial ke atas seperti halnya yang dialami Bia, tampaknya merupakan pola umum nelayan Prigi. Menurut Damis, seorang nelayan Prigi pemilik *slerek*, modal dari pemodal bisa berupa uang untuk membeli ikan, bisa juga berupa perahu untuk menangkap ikan. Bia adalah contoh mereka yang mendapatkan modal dalam bentuk kapal. Nelayan yang mendapatkan kepercayaan seperti ini terutama adalah *juru mudi* yang *solok*, yakni *juru mudi* yang mempunyai keterampilan tinggi dan hampir senantiasa berhasil setiap kali melakukan penangkapan ikan. Nelayan seperti ini mempunyai nilai lebih, dan mereka sering diperebutkan oleh para pemodal. Dengan jabatan nahkoda yang disandanginya, atau modal uang untuk pembelian ikan yang mereka kuasai, mereka mempunyai kemampuan lebih untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan.

Sejumlah nelayan yang memiliki *slerek* saat ini, menurut cerita Damis, sebelumnya adalah *juru mudi solok*. Kedudukannya sebagai *juru mudi* memungkinkan mereka untuk menabung. Setelah memiliki uang yang cukup, mereka kemudian melakukan “pemberontakan”, *gawe goro-goro* menurut istilah pada Damis, dan bernegosiasi kepada pemberi modal, siapa yang harus menjadi pemilik atas perahu. Dalam konflik kepentingan seperti ini, biasanya pemodal melepaskan hak kepemilikannya. Jika tidak, dengan tabungan yang mereka miliki, *juru*

mudi tersebut membuat perahu sendiri. Menurut istilah Damis, orang-orang seperti ini “*ditulung malah nggiplek*”, ditolong, tapi justru mencelakakan (pepatah Jawa: *ditulung mentung*).

Mobilitas sosial nelayan terjadi tidak saja secara linier seperti yang diketengahkan di atas. Perubahan status nelayan dari nelayan buruh (ABK) menjadi nelayan pemilik perahu ternyata bisa terjadi melalui proses loncatan panjang. Sebuah kasus yang dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Yanto Nur, menggambarkan proses tersebut. Namun demikian, mobilitas sosial seperti ini jarang terjadi. Yanto Nur adalah seorang *tukang kuras*. Dalam stratifikasi masyarakat nelayan Prigi, *tukang kuras* berada pada tataran terendah. *Tukang kuras* bertugas membersihkan perahu setiap kali mendarat, memelihara dan menjaga perahu selama tidak melaut, dan membantu *pengurus* dalam penyediaan perbekalan melaut. Upah *tukang kuras* tidak menentu, tergantung pada *juru mudi* dan nelayan *johnson*.¹⁷ Karena itu, *tukang kuras* selalu berusaha membangun hubungan baik dengan *juru mudi* ataupun nelayan *johnson*. Mereka mendapat bayaran dalam bentuk ikan, satu, dua atau tiga keranjang ikan, atau lebih dari itu (tergantung jumlah ikan tangkapan). Bila usaha penangkapan ikan gagal, *tukang kuras* tidak memperoleh upah apapun.

Sejak tahun 1977, Yanto Nur telah menjadi *tukang kuras*, dan dia menekuni pekerjaannya tersebut selama 29 tahun. Pada tahun 2006, dia berhasil membeli satu unit perahu *slerek*, sebuah prestasi yang luar biasa dari seorang *tukang kuras*. Dengan uang hasil kerja kerasnya sebagai *tukang kuras* selama itu, ditambah pinjaman dari pedagang ikan, dia berhasil membeli sebuah *slerek*, meskipun tidak baru. Pinjaman pada pedagang ikan tersebut dibayar secara angsuran, terutama pada saat-saat penen ikan. Mobilitas sosial yang dialami oleh Akhsan dari Karangsong sebagaimana diuraikan di atas bisa dikelompokkan ke dalam kasus loncatan panjang sebagaimana yang dialami Yanto Nur.

Lain halnya dengan Samdi, yang saat ini telah memiliki 3 unit perahu *slerek*. Dia berhasil menjadi seorang *juragan darat* setelah

¹⁷Nelayan *Johnson* adalah nelayan yang ada di perahu *Johnson*. Satu unit perahu *slerek* terdiri dari dua buah perahu, yakni perahu utama yang mengangkut ABK dan jaring, tempat jaring ditaburkan, dan perahu *Jonhson* untuk menarik ujung jaring ketika jaring ditaburkan, dan menampung ikan hasil tangkapan. Disebut *Johnson* karena perahu ini awalnya menggunakan mesin *Johnson*. Nelayan *Johnson* berjumlah empat orang.

menempuh proses perjuangan yang panjang. Dia menjadi nelayan sejak umur 12 tahun, yang waktu awalnya, dia hanya sebagai pembantu ayahnya. Pada tahun 1972, Samdi menjadi nelayan buruh jaring tarik, yakni jaring yang ditebarkan di perairan dangkal dekat pantai, dan ditarik sampai ke darat. Tujuh tahun kemudian, Samdi baru berhasil menjadi ABK *slerek*. Posisi sebagai ABK *slerek* dijalannya sampai 3 tahun lamanya, dan pada tahun 1982, dia naik pangkat menjadi *juru mudi*. Baru pada tahun 1994, yakni setelah 12 tahun menjadi *juru mudi*, Samdi mampu membeli perahu *slerek* sendiri dengan uang hasil kerja kerasnya selama itu dan pinjaman dari keluarga. Dengan modal satu unit perahu *slerek* yang dimilikinya, pada tahun 1999 Samdi membeli lagi satu unit perahu *slerek*. Pada tahun 2012, dia telah memiliki 3 unit perahu *slerek*. Dari hasil ketiga *slerek* miliknya, dia sewaktu-waktu dapat saja membuat *slerek* baru, tanpa memanfaatkan kredit dari bank. Padahal, harga per satu unit *slerek* pada saat ini bisa mencapai Rp.1.5 milyar rupiah (Masyhuri, Tanpa Tahun).

Menurut Samdi, peran *juru mudi* (nahkoda) dan *pengurus* dalam pengoperasian perahu *slerek* sangat menentukan bagi pemilik *slerek*. Kedua jabatan tersebut harus dipegang oleh orang-orang yang memihak kepada pemilik *slerek*. Kalau tidak, pemilik *slerek* bisa mengalami kebangkrutan. *Juru mudi* adalah seseorang yang memegang kewenangan dalam menentukan banyak sekikitnya jumlah *esek* dan *krentilan* untuk ABK. Sementara itu, *pengurus* sangat menentukan besar dan kecilnya pengeluaran untuk perbekalan, perbaikan dan perawatan perahu. Kalau perlu, demikian menurut syahbandar setempat, kedua jabatan tersebut harus dipegang oleh keluarga sendiri (Wawancara dengan Dwi Bowo, Syah Bandar Prigi, pada 28 April 2012).

Wiran, Mujadi, dan Ismail merupakan nelayan-nelayan yang mengalami mobilitas sosial ke atas di kalangan nelayan Bagansiapiapi. Wiran pada awalnya hanyalah seorang ABK atau nelayan buruh menurut sebutan setempat. Pada tahun 2009, dia berhasil membeli sebuah kapal *pompong* bekas dengan pembayaran secara angsuran. *Pompong* adalah istilah setempat untuk kapal nelayan yang berukuran paling besar yang ada di daerah ini. Hasil jerih payahnya selama menjadi ABK, ditambah uang pinjaman dari keluarganya, belum menyukupi untuk melunasinya. Beruntung pemilik sebelumnya merupakan teman akrabnya, sehingga kekurangannya bisa diangsur setiap waktu pada saat-saat hasil tangkapannya melimpah. Dengan kapal *pompong* miliknya, statusnya berubah. Dia tidak lagi sebagai nelayan buruh, tetapi telah meningkat

menjadi nelayan pemilik *pompong*. Menurut pengakuan yang disampaikan, pendapatannya meningkat, dan dengan demikian, kesempatan untuk mengembangkan usahanya menjadi semakin besar.

Lain halnya dengan Mujadi, dia harus bekerja sendirian dari nol, tanpa bantuan dari keluarga. Pada saat ini, Mujadi bisa dikatakan sebagai salah satu nelayan yang berhasil. Ia merupakan salah seorang *bangliau* yang ada di Bagan Hilir, Bagansiapiapi. Seperti Wiran, pada awalnya dia hanyalah seorang nelayan buruh, dan sampai tahun 1990, ia masih tetap dalam statusnya itu. Sifat dasar yang membantu keberhasilan usahanya adalah ketekunan menabung. Dia mengaku bahwa menabung merupakan kesukaannya, dan uang yang digunakan untuk membeli perahunya yang pertama, katanya, sebagian adalah hasil tabungannya sejak dia masih di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perahu pertamanya, yakni sebuah perahu *boat* bekas, dibeli pada tahun 2000, yakni setelah sepuluh tahun bekerja sebagai nelayan buruh.¹⁸ Tahun 2003, dia berhasil lagi membeli sebuah *boat* yang kedua. Pada saat ini dia telah memiliki lima buah *boat*. Perahu *boat* terakhir miliknya dibuat pada tahun 2011. Selain memiliki sejumlah perahu *boat*, dia juga merupakan pemilik sebuah gudang (*tangkahan*), sebagai tempat pendaratan ikan. Atas keberhasilannya tersebut, dia dipilih menjadi ketua kelompok *Nelayan Jaya*, sebuah organisasi nelayan yang beranggotakan 50 nelayan pemilik *boat*.

Ismail, kasus lain, menjadi nelayan pemilik perahu dimulai dari kepemilikannya atas *sampan*, perahu ukuran terkecil yang ada di daerah Bagansiapiapi. Sebelum memiliki perahu, dia juga bekerja sebagai nelayan buruh pada perahu milik kakaknya. Dia mengaku sudah menjadi nelayan selama 20 tahun, dan selama itu, dia tidak pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah atau pinjaman dari bank. Dengan bermodalkan sebuah *sampan*, Ismail kemudian berhasil membeli sebuah kapal *pompong*. Bagi Ismail sendiri, status sebagai nelayan pemilik kapal *pompong* yang ada padanya saat ini tampaknya merupakan capaian yang paling besar dari usahanya selama 20 tahun sebagai nelayan.

Mobilitas sosial di kalangan nelayan tidak selalu berarti vertikal ke atas. Sejumlah kasus diketemukan pula banyak nelayan pemilik sarana penangkapan ikan yang mengalami kegagalan usaha. Perahu miliknya dijual, dan itu dilakukan karena terpaksa untuk melunasi hutang

¹⁸Kapal nelayan yang disebut *boat* berukuran lebih kecil dibandingkan dengan kapal *pompon*.

perbekalan yang menumpuk. Banyak faktor yang menjadi sebabnya. Di Karangsong, nelayan harus pandai-pandai memilih alat tangkap yang digunakan. Salah pilih dalam hal ini bisa berakibat kebangkrutan. Ungkapan seperti “nelayan jaring apung bisa sakit tapi tidak bisa mati. Jaring *purse seine* bisa sakit dan bisa mati” memberi isyarat pentingnya pemilihan terhadap sarana penangkapan ikan. Kebangkrutan nelayan di Bagansiapiapi menunjukkan kecenderungan yang mirip dengan apa yang terjadi di Karangsong. *Over fishing* yang dihadapi oleh kedua daerah tersebut tampaknya merupakan faktor penting penyebabnya. Kebangkrutan sejumlah nelayan di Prigi umumnya disebabkan oleh dominasi nahkoda dan ABK dalam pengalokasian peruntukan ikan hasil tangkapan. Strategi khusus perlu dikembangkan sehingga kontrol dari pemilik sarana produksi terhadap pemanfaatan ikan hasil tangkapan dapat dijalankan dengan baik. Jika tidak, menurut sejumlah sumber, seorang *juragan* pemilik *slerek* akan mengalami kebangkrutan, ditinggalkan oleh ABK, perahu tidak dapat melaut, sementara hutang perbekalan menumpuk. Barangkali inilah yang dimaksudkan ungkapan “kalau mau miskin buatlah *slerek*”. Juragan pemilik *slerek* bisa saja tidak mendapatkan bagian ikan hasil tangkapan dalam waktu yang lama.

Bagaimanapun juga, potensi nelayan untuk mengembangkan usahanya masih tampak terbuka luas. Dengan kemampuan sendiri, dan pembiayaan yang diperoleh terutama dari lembaga pembiayaan nonformal, mereka dapat membangun usaha yang mereka geluti, meskipun usaha tersebut merupakan usaha padat modal. Bagi nelayan sukses, peran lembaga pembiayaan, baik nonformal maupun formal, sudah tidak lagi begitu penting. Bagi nelayan yang telah memiliki sejumlah kapal, mereka umumnya tidak lagi memerlukan modal pinjaman. Dengan hasil dari kapal yang telah mereka miliki, setiap saat mereka mampu membiayai sendiri pembuatan perahu baru.

Dampak dari proses perkembangan usaha perikanan tangkap yang demikian adalah keanekaragaman usaha serta sarana dan prasarana penangkapan ikan. Selain itu, tampak pula bahwa peran dan status seorang nelayan dalam organisasi penangkapan ikan sangat berpengaruh pada proses mobilitas sosial yang terjadi. Semakin penting peran seseorang dalam organisasi penangkapan ikan, semakin cepat pula seseorang tersebut mengalami perkembangan. Lebih lanjut, hal ini berpengaruh pada pola mobilitas sosial yang terjadi, pola mobilitas sosial yang linier sifatnya, yang meningkat dari satu tataran ke tataran

berikutnya yang lebih tinggi, atau loncatan-loncatan vertikal yang insidental sifatnya.

Kesimpulan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembiayaan nonformal merupakan fenomena yang hidup terus secara berkesinambungan di kalangan nelayan perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap yang padat modal, pola pendapatan nelayan yang tidak teratur, dan keengganan bank menyalurkan kredit pada usaha perikanan tangkap mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan tumbuh suburnya pembiayaan nonformal. Meskipun dalam batas-batas tertentu, pembiayaan nonformal mendatangkan kerugian bagi nelayan, hal tersebut tetap mempunyai arti yang positif pada usaha perikanan tangkap sejauh institusi pengganti belum tersedia. Tanpa modal dari pemodal nonformal, investasi dalam jumlah yang memadai pada usaha perikanan tangkap hampir-hampir tidak akan terjadi. Tanpa modal yang cukup, nelayan tidak akan mampu mengembangkan usahanya, dan dengan demikian mobilitas sosial di kalangan masyarakat nelayan serta perkembangan usaha perikanan tangkap akan sulit terjadi. Dengan modal dari lembaga pembiayaan nonformal, nelayan-nelayan perikanan tangkap yang tidak memiliki modal secara bertahap dapat merintis usahanya, yang pada akhirnya mereka menjadi nelayan yang bermodal dan mandiri. Lembaga pembiayaan nonformal tampaknya mampu beradaptasi terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Pinjam meminjam dan hubungan kerja berdasarkan kepercayaan merupakan fenomena sosial yang menonjol pada masyarakat nelayan perikanan tangkap. Pinjam meminjam hampir senantiasa terjadi di antara mereka, dan ini merupakan faktor lain yang memungkinkan terus berkembangnya lembaga pembiayaan nonformal. Jaminan sebagai landasan ikatan kerja sama dan pinjam meminjam hampir-hampir tidak dikenal, dan kepercayaan (*trust*) di antara mereka lebih didasarkan pada hubungan personal daripada kepercayaan yang tumbuh atas dasar hubungan institusional. Membangun kepercayaan atas dasar hubungan personal jelas berbeda dengan membangun kepercayaan atas dasar hubungan institusional, dan ini tentunya sangat krusial bila ingin mengembangkan lembaga pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan. Tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut, pengembangan lembaga pembiayaan pada usaha perikanan tangkap,

khususnya usaha perikanan tangkap skala kecil, tampaknya akan mengalami kesulitan dan kegagalan.

Daftar Pustaka

- Bagchi, A.K. 1976. "De-industrialization in India in the Nineteenth Century: Some Theoretical Implications". *Journal of Development Studies*, 12 (2), 135-164.
- Bailey, C. 1988. "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia", *Indonesia*, 46, 25-38.
- Boomgaard, P. 1989. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795 -1880*. Amsterdam: Free University Press.
- "BRI Beri Kemudahan Akses Kredit". 2012. *Akuamina: Inovasi dan Bisnis Perikanan*, Edisi 44, Tahun II, 1 -15 September.
- Butcher, J. G. 2004. *The Closing of the Frontier: A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850-2000*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Butcher J.G & H. Dick (Ed.). 1993. *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. New York: Martin's Press.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Refleksi 2011, Outlook 2012: Pembangunan Perikanan Tangkap*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dirjen Perikanan. 1997. "Kebijakan Nasional di Bidang Perikanan". Makalah belum diterbitkan, disajikan pada seminar *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Jakarta, 7 Agustus.
- Indeks Produksi Perikanan Menurut Provinsi 2005-2009*. 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Laporan Tahunan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 1996*. 1997. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Laporan Tahunan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2010*. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Masyhuri. Tanpa tahun. "Pembiayaan Informal Dan Dinamika Usaha Perikanan Tangkap", dalam M. Thoha (Ed.), *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat Pada Subsektor Perikanan Tangkap* (Naskah yang belum diterbitkan).
- Masyhuri. 1996. *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV Jakarta.
- Masyhuri. 1998. "Usaha Penangkapan Ikan di Jawa dan Madura: Produktivitas dan Pendapatan Buruh Nelayan". *Masyarakat Indonesia*, 24 (1), 51-66.
- Masyhuri (Ed.). 1998. *Strategi Pengembangan Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: PEP-LIPI.
- Masyhuri. 2001. "Dimensi Ekonomi Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9 (1). 73 -98.
- Masyhuri. 2006. "Dimensi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Nelayan". Dalam A.B. Lopian dkk. (Ed.). *Sejarah dan Dialog Perubahan*. Jakarta: LIPI Press.
- Masyhuri. 2009. "Iptek dan Dinamika Ekonomi Nelayan". Dalam Bondan Kusumoyoso dkk (Ed.). *Kembara Bahari: Esai Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lopian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Masyhuri. 2013. "Lembaga Keuangan Informal Dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap", dalam Mochammad Nadjib (Ed). *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta: LIPI Press.
- Mubyarto, dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Nadjib, Mochammad (Ed.). Akan terbit. *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta: LIPI Press.

- Sawit, Husain M. 1988. "Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama", *Masyarakat Indonesia*, 15, 67-87.
- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University.
- "Selayang Pandang Perikanan Tangkap Kabupaten Rokan Hilir". Tanpa Tahun. Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir yang tidak diterbitkan.
- Semedi, Pujo. 2003. *Close the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Community, 1820s – 1990s*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Susilo, Edi. 2010. *Dinamika, Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Thoha, M. Akan terbit. *Studi Model Lembaga Pembiayaan Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*. Jakarta: Puslit Ekonomi (P2E)-LIPI.